

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, F., & Muhidin, N. (2012). *Hukum Tata Pemerintahan: heteronom dan otonom*. Refika Aditama.
- Amiruddin & Zainuddin, 2004, Pengantar Metode penelitian hukum,
- Arif Yulianto, 2002, *Hubungan sipil militer di Indonesia Pasca ORBA ditengah pusaran demokrasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 198-234.
- Bedner, A. (2001). *Administrative courts in Indonesia: a socio-legal study* (Vol. 6). Martinus Nijhoff Publishers.
- Crouch, H. (2021). *Military-Civilian Relations in Indonesia: An Evolving Balance*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Emita Distiana, 2018, *MASA REFORMASI*, Derwati Press, Pontianak Selatan.
- Fahmi, M. R. (2023). "Reformasi TNI dan Ambiguitas Jabatan Sipil dalam Perspektif Tata Negara." *Mimbar Hukum*, 35(1), 89–106
- Faisal Santiago, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cintya Press Jakarta
- Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta :Rajawali.
- Hamidi, J. (1999). *Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (AAUPPL) di lingkungan peradilan administrasi Indonesia: upaya menuju" clean and stable government"*. Citra Aditya Bakti.
- Hendri Supriyatmono, 1994, *NASUTION, DWIFUNGSI ABRI DAN KONTRIBUSI KE ARAH REFORMASI POLITIK*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- I Gusti Kade Budhi H., 2021, *Filsafat Hukum*, Depok Rajawali Pers,
- Jimly Asshiddiqie, 2024, *DINAMIKA PEMIKIRAN PAKAR HUKUM INDONESIA Etika dan Teori Hukum*, Setara Press Malang.

- Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Uny Press.
- Mardani, 2024, *TEORI HUKUM Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*; KENCANA, Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno.
- Munir Fuady, 2014, *TEORI-TEORI BESAR DALAM HUKUM (GRAND THEORY)* KENCANA, Jakarta.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Leip.
- Raharjo, S. (2006). *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Kompas.
- raja grafindo persada.
- Saldi Isra. (2024). *Hukum Tata Negara dan Relevansi Reformasi Militer dalam Perspektif Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sidrataha Muktar, 2015, *MILITER DAN DEMOKRASI: Pemikiran Letjen (Purn.) Agus Widjojo tentang Reformasi TNI dalam Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, AYNAT PUBLISHING, Yogyakarta.
- Sikti, A. S. (2022). *Menggugat kepastian hukum*. CV Mandar Maju.
- Subagyo, A., & IP, S. (2017). *Mewujudkan Profesionalisme TNI AD Di Era Reformasi*. *Jurnal Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat*, 2(2).
- Sudikno Meriokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke empat, Jakarta, 1957. hlm 36
- van Apeldoorn, L. J. (2011). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht (Pengantar Ilmu Hukum)*. *Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita*, Jakarta.

Wawan H. Perwanto, 2011, *TNI & Tata Dunia Baru Sitem Pertahanan*, CMB Pres, Jakarta Timur.

Zainuddin Ali, 2009, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Sinar Grafik, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN- MENTRI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUS GUGUR ATAU TEWASNYA BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

C. Jurnal

Amran, A., Tamrin, A., Pasanda, D., & Haba, R. (2022). Analisis Hukum Terhadap Perubahan Norma Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Sawerigading Law Journal*, 1(1), 10-18.

- Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal Ham*, 11(2), 255-267.
- I Putu Nopa Suryawan, I Ketut Laba Sumarjiana, 2020, IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI, *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Volume 10, Nomor 2
- Ichtiari, F. A., Safira, I. N., & Ramadhan, I. F. (2024). PROBLEMATIKA DWIFUNGSI ABRI. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 2(1), 90-95.
- Indonesia, K. P. R. (2015). Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). *WIRA: Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 56, 40.
- Kamil, M. A. (2022). *Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Maulidin, M., Gani, I. A., & Efendi, E. (2023). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 68-88.
- Muhammad, M. (2023). Role and Function of General Government Properties As a Guide of State Administration Officers in Running Its Business. *Meraja journal*, 2(3), 101-109.
- Nisa, G. K., & Ruslie, A. S. (2025). Dampak Pengangkatan Anggota TNI Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah Terhadap Tatakelola Pemerintah. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1318-1330.
- Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Kemanfaatan hukum Jeremy Bentham relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 183-93.

Officials in Indonesia are Viewed from the Concept of Good Governance. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture (ESIC)*, 8(3).

Pramesti, A. A. (2024). Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Anggota TNI Aktif Ditinjau Dari Segi Hukum. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(05), 22-37.

Razaq, M. K. A. (2024). Militerisme dan Demokrasi: Evaluasi Hak Politik TNI-Polri di Indonesia Pasca-Reformasi. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 3(2), 251-272.

Sabrian, M. F., & Harahap, M. Y. (2026). Pengangkatan Anggota Aktif TNI Sebagai Sekretaris Kabinet Dalam Perspektif UU Nomor 34 Tahun 2004 dan Fiqih Siyasah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 39-56.

Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45.

Situmeang, T. (2024). The Concurrent Implications of Government

Sofuan, T. K. (2023). Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi Abri Pada Masa Orde Baru. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 9(2), 162-170.

Yosarie, I. (2025). Revisi Tanpa Semangat Reformasi: Residu Dwifungsi ABRI Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia: Revision Without the Spirit of Reform: Residues of the ABRI's Dual Function in the Revision of Law Number 34 of 2004 Concerning the Indonesian National Armed Forces. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 22(1), 22-31.

D. Media Online

Detik.com 27 Maret 2025 Aksi Tolak Revisi UU TNI di DPR, Massa Serukan 'Selain Sipil Dilarang Masuk' Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7844804/aksi-tolak-revisi-uu-tni-di-dpr-massa-serukan-selain-sipil-dilarang-masuk>.

Forumkeadilan.com 26 Maret 2025 4.472 Prajurit TNI Duduki Jabatan Sipil, PBHI Desak Komisi I Lakukan Evaluasi Diakses dari <https://forumkeadilan.com/2025/03/26/4-472-prajurit-tni-duduki-jabatan-sipil-pbhi-desak-komisi-i-lakukan-evaluasi/>

UU TNI Tegaskan Batasan Peran Prajurit di Ranah Sipil – Cegah Kembalinya Dwifungsi Militer (<https://www.neraca.co.id/article/217330/uu-tni-tegaskan-batasan-peran-prajurit-di-ranah-sipil-cegah-kembalinya-dwifungsi-militer>

Penunjukan Brigjen Andi Chandra As'aduddin Sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat Dilihat Dari Segi Hukum (<https://hukumexpert.com/penunjukan-brigjen-andi-chandra-asaduddin-sebagai-penjabat-pj-bupati-seram-barat-dilihat-dari-segi-hukum/?detail=ulasan>)

Menhan Sebut UU TNI Memperjelas Batasan Tugas Non-militer Prajurit (<https://www.tempo.co/politik/menhan-sebut-uu-tni-memperjelas-batasan-tugas-non-militer-prajurit-1222037>) diakses 22 Januari 2026

Penunjukan Anggota TNI Aktif Jadi Pj Bupati Seram Barat Dikritik DPR(<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/24/penunjukan-anggota-tni-aktif-jadi-pj-bupati-seram-barat-dikritik-dpr>)

Menelaah Wacana Polri di Bawah Kementerian, Apa Untung Ruginya? (<https://www.theindonesianinstitute.com/menelaah-wacana-polri-di-bawah-kementerian-apa-untung-ruginya/>)

Perwira TNI jadi penjabat kepala daerah: 'Mencederai reformasi dan prinsip demokrasi', dwi fungsi TNI/Polri terulang kembali?
(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61576564>)

